



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo
Telp : 031- 8665369
Email : Surabaya@dilmil.org



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Laporan ini memuat data dan informasi tentang pelaksanaan tugas serta capaian di bidang kesekretariatan, kepaniteraan dan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selain ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas kerja juga dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan penyebaran virus covid-19. Beberapa bentuk optimalisasi teknologi informasi yang telah dilakukan diantaranya yaitu melaksanakan sidang secara online, menyediakan pelayanan secara online dan pembuatan aplikasi penunjang kinerja.

Dalam hal pengembangan sumber daya manusia, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah secara aktif mengikutsertakan pegawainya dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi baik untuk tenaga teknis maupun non-teknis. Kegiatan tersebut diikuti baik secara daring maupun luring. Selain itu Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga mendukung dan memfasilitasi proses pendataan para tenaga PPNPN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang dilakukan oleh BKN dengan harapan agar para tenaga PPNPN ini dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan status kepegawaiannya.

Penunjukan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai tempat magang para calon hakim militer untuk yang ketiga kalinya di tahun 2022 merupakan suatu



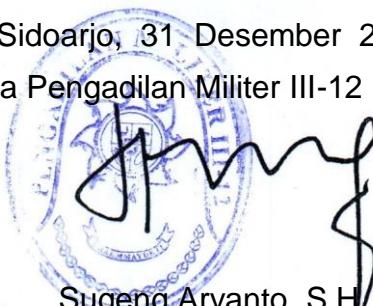
kehormatan dan bentuk kepercayaan dari pimpinan pusat kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Tidak terlupa pula ucapan syukur atas keberhasilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah memperoleh nilai *surveillance* akreditasi penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent), Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan mendorong Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sidoarjo, 31 Desember 2022

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GRAFIK	8
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Profil Peradilan	9
B. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	12
BAB II MANAJEMEN PERKARA	14
A. Keadaan Perkara	14
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	14
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	19
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	20
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	20
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	20
B. Penyelesaian Perkara	22
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	22
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	23
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	24
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	25
C. Pelayanan Sidang Keliling	26
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	28
A. Data Sebaran Pegawai	29
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	29
2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	30
3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	30
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31
5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	32
B. Mutasi	32
1. Mutasi Keluar	33
2. Mutasi Masuk	34
C. Promosi	34
1. Kenaikan Pangkat	35
2. Kenaikan Jabatan	36
D. Pensiun	36
E. Pendidikan Dan Pelatihan	37



BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	42
A. Pengelolaan Keuangan	42
1. DIPA Dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	43
2. DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	45
3. Keuangan Dari Perkara	46
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	47
1. Pengadaan Sarana Dan Prasarana	48
2. Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	49
3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	52
4. Penghapusan Sarana Dan Prasarana	53
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	53
1. Implementasi e-Court	53
2. Implementasi SIPP	54
3. Dukungan Aplikasi	55
4. Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	57
BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	59
A. Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	59
B. Penilaian Zona Integritas	61
C. Sertifikasi ISO	61
D. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	62
E. Inovasi Pelayanan Publik	63
F. Hasil Survei Pelayanan Publik	68
1. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69
2. Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	69
BAB VI PENGAWASAN	70
A. Pengawasan Internal	70
1. Pengawasan Bidang	71
2. Penanganan Gratifikasi	73
3. Penerapan SPIP	73
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat	74
B. Pengawasan Eksternal	75
C. Evaluasi	77
1. Evaluasi Pengawasan Bidang	78
2. Evaluasi Penanganan Gratifikasi	80
3. Evaluasi Penerapan SPIP	80
4. Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	81
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	82
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Peta Wilayah Hukum	10
Gambar II.2	Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya	11
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	60
Gambar V.2	Piagam Penghargaan WBK	61
Gambar V.3	Sertifikat ISO 9001:2015	62



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	15
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	17
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	17
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	18
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu	21
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	21
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	24
Tabel II.8	Pelaksanaan Sidang Keliling	26
Tabel III.1	Data Pegawai	28
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	29
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	30
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	30
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	32
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	33
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	34
Tabel III.9	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	35
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai	36
Tabel III.11	Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai	37
Tabel III.12	Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai	39
Tabel III.13	Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai	40
Tabel IV.1	Revisi DIPA 01	43
Tabel IV.2	Pagu Anggaran DIPA 01	44
Tabel IV.3	Pengelolaan DIPA 01	44
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran DIPA 01	45



Tabel IV.5	Pengelolaan DIPA 05	46
Tabel IV.6	Realisasi Anggaran DIPA 05	46
Tabel IV.7	Jumlah Biaya Perkara	47
Tabel IV.8	Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana	48
Tabel IV.9	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	50
Tabel IV.10	Daftar Kendaraan Dinas	50
Tabel IV.11	Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi	50
Tabel IV.12	Daftar Inventaris Kantor Lainnya	51
Tabel IV.13	Spesifikasi Perangkat Server	58
Tabel V.1	Data Layanan Melalui PTSP	63
Tabel V.2	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	67
Tabel V.3	Data Peminjaman Ruang Sidang	68
Tabel V.4	Survei IKM Tahun 2022	69
Tabel V.5	Survei IPK Tahun 2022	69
Tabel VI.1	Pengaduan Masyarakat	74
Tabel VI.2	LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periode 2021	76
Tabel VI.3	LHKASN Seluruh Pegawai Sipil (PNS)	77



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2022	16
Grafik III.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	30
Grafik III.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	31



BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL PERADILAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

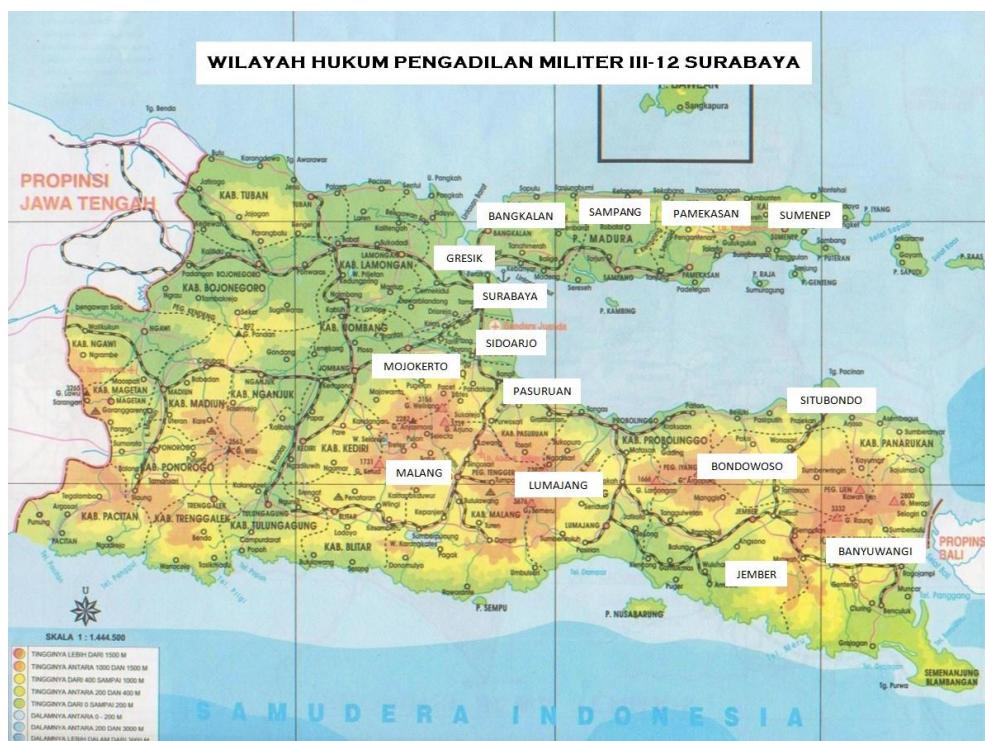
Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar II.1 Peta Wilayah Hukum



Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi ini disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

VISI

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung



MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya berbentuk bulat telur berwarna emas dengan beberapa gambar di dalamnya. Gambar dan arti lambang sebagaimana ditunjukkan di bawah.

Gambar II.2 Gambar Dan Makna Lambang Pengadilan Militer III-12 Surabaya





Sebagai pemicu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengembangkan dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.



Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2022 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2023.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2022 merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Kegiatan ini bersifat teknis dan non teknis.



BAB II

MANAJEMEN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara yang akan diuraikan dalam Bab II ini meliputi keadaan perkara tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) dan tingkat grasi.

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pidana pelanggaran.

Di tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2021 sebanyak 15 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 193 perkara yang terdiri dari 181 perkara kejahatan dan 12 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2022 sebesar 208 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 177 perkara yang terdiri dari 159 perkara kejahatan, 6 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2022 berjumlah 31 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan yang terdiri dari 6 perkara desersi Inabsensia, dan 25 perkara kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :



- Bawa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Posisi Terdakwa, Penasihat Hukum dan para saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. sehingga Majeli Hakim berpendapat akan lebih efisien apabila terhadap berkas perkara Terdakwa ini untuk disidangkan dipersidangan dengan tempat kedudukan Terdakwa berada

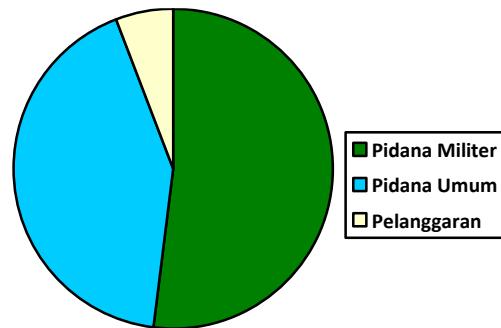
Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I Pidana Umum :		
	Sisa perkara 2021	9
	Perkara masuk 2022	99
	Total Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022)	108
	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan	9
	Perkara masuk 2022 yang diselesaikan	23
Sisa perkara pidana umum akhir TA 2022		
II Pidana Militer :		
	Sisa perkara 2021	6
	Perkara masuk 2022	82
	Total Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022)	88
	Sisa perkara 2021 yang diselesaikan	6
	Perkara masuk 2022 yang diselesaikan	8
Sisa perkara pidana militer akhir TA 2022		
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2021	0
	Perkara masuk 2022	12
	Total Perkara 2022 (Sisa 2021 + Masuk 2022)	12
	Sisa perkara 2022 yang diselesaikan	0
	Perkara masuk 2022 yang diselesaikan	12
Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2022		
Sisa perkara akhir TA. 2022		



Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Grafik II.1 Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2022





Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir				
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	
Januari	9	5	1	15	11	13	0	24	4	3	0	7	0	0	0	0	3	3	0	6	0	0	0	0	16	15	1	32	
Februari	16	15	1	32	14	4	0	18	5	1	0	6	0	0	0	0	4	2	0	6	0	0	0	0	25	18	1	44	
Maret	25	18	1	44	16	10	0	26	4	6	0	10	0	0	0	0	2	2	0	4	0	0	0	0	37	22	1	60	
April	37	22	1	60	9	3	0	12	16	9	1	26	0	0	0	0	10	10	0	20	0	1	0	1	30	15	0	45	
Mei	30	15	0	45	4	5	0	9	4	5	0	9	0	0	0	0	4	2	0	6	0	0	0	0	30	15	0	45	
Juni	30	15	0	45	5	0	0	5	19	5	0	24	0	0	0	0	10	4	0	14	2	1	0	3	14	9	0	23	
Juli	14	9	0	23	3	5	0	8	7	5	0	12	0	0	0	0	8	4	0	12	1	0	0	1	9	9	0	18	
Agustus	9	9	0	18	13	13	0	26	4	3	0	7	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	18	19	0	37	
September	18	19	0	37	7	1	1	9	7	10	0	17	0	0	0	0	2	12	0	14	0	0	0	0	18	10	1	29	
Oktober	18	10	1	29	9	10	1	20	12	5	0	17	0	0	0	0	0	13	6	0	19	1	0	0	1	14	15	2	31
November	14	15	2	31	9	6	1	16	6	4	0	10	0	0	0	0	0	5	2	0	7	0	0	0	0	17	17	3	37
Desember	17	17	3	37	2	6	0	8	6	7	1	14	0	0	0	0	0	3	5	0	8	0	0	0	0	13	16	2	31
JUMLAH					102	76	3	181	94	63	2	159	0	0	0	0	66	52	0	118	4	2	0	6					

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	5	0	0	5	1	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	4
September	4	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					12	0	0	12	12	0	0	12	0	0	0	0				



Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel II.4 di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

No	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Dikembalikan	Sisa Akhir
1	Atasan Memukul Bawahan	0	4	3	1	1
2	Desersi	6	63	62	0	7
3	Illegal Logging	0	0	0	0	0
4	Illegal Tapping	0	0	0	0	0
5	Insubordinasi	0	1	1	0	0
6	Karena Kepalannya menyebabkan orang lain luka	0	0	0	0	0
7	Karena Kepalannya menyebabkan orang lain mati	0	0	0	0	0
8	Kecelakaan lalu lintas	0	2	2	0	0
9	Kejahatan terhadap penguasa umum	0	0	0	0	0
10	Kekerasan dalam Rumah tangga	2	17	16	0	3
11	Kekerasan terhadap orang lain	0	3	1	0	2
12	Kekerasan Terhadap Orang/Barang	0	0	0	0	0
13	Kepabeanan	0	0	0	0	0
14	Korupsi	0	0	0	0	0
15	Mangkir	0	19	18	0	1
16	Melawan Atasan	0	0	0	0	0
17	Memakai tanah tanpa izin yang berhak	0	0	0	0	0
18	Memaksa masuk ke dalam rumah orang lain	0	0	0	0	0
19	memaksa orang dengan kekerasan	0	0	0	0	0
20	Membuat atau memakai surat palsu	0	0	0	0	0
21	Menerima Hadiah	0	0	0	0	0
22	Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar	0	0	0	0	0
23	Menghilangkan alat perang	0	2	2	0	0
24	Mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
25	merampas kemerdekaan seseorang	0	0	0	0	0
26	Minyak dan gas bumi	0	0	0	0	0
27	Narkotika Gol. I	1	1	1	0	1
28	Pelanggaran Lalint	0	12	12	0	0
29	Pelanggaran Lalint mengakibatkan korban luka berat	0	1	1	0	0
30	Pelanggaran susila	0	20	18	0	2
31	Pemalsuan Surat	0	2	2	0	0



32	Pembiaran Melakukan Pidana	0	0	0	0	0
33	Pembunuhan	0	2	1	0	1
34	Pemerasan	0	1	1	0	1
35	Penadahan	0	0	0	0	0
36	Penculikan	0	0	0	0	0
37	Pencurian	1	8	7	0	2
38	Penganiayaan	0	3	3	0	0
39	Penganiayaan ringan	0	0	0	0	0
40	Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat	0	0	0	0	0
41	Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati	0	0	0	0	0
42	Pengeroyokan	0	0	0	0	0
43	Penggelapan	0	5	3	0	2
44	Pengrusakan	0	1	1	0	0
45	Penipuan	1	11	9	0	3
46	Penjaga meninggalkan pos	1	0	1	0	0
47	Penyalahgunaan wewenang	0	0	0	0	0
48	Penyuapan	0	0	0	0	0
49	Perbuatan tidak menyenangkan	0	0	0	0	0
50	Perjudian	1	0	1	0	0
51	Perkawinan Ganda/Poligami	0	2	1	0	1
52	Perkelahian	0	0	0	0	0
53	Perkosaan	0	0	0	0	0
54	Perlindungan anak	0	0	0	0	0
55	Pertanahan	0	0	0	0	0
56	Perzinahan	0	5	2	0	3
57	Pornografi	0	0	0	0	0
58	Psikotropika	0	0	0	0	0
59	Senjata api	2	5	6	0	1
60	Tahanan Lari	0	0	0	0	0
61	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	0	0	0	0
62	Tidak menaati perintah dinas	0	1	1	0	0
63	Lain-Lain	0	2	1	0	1
Jumlah		15	193	177	0	31

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Perkara Putus tahun 2022 yang kemudian mengajukan upaya hukum banding yaitu berjumlah 48 perkara. Seluruh berkas permohonan banding telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara lengkap dan tepat waktu.



Putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022 adalah 48 Putusan banding tersebut 6 perkara tahun 2022 menyatakan menerima dan 40 perkara tahun 2022 mengajukan upaya hukum kasasi (1 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama), 2 perkara putus masih dalam proses untuk pembacaan putusan banding.

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Tahun 2022 terdapat Perkara tingkat pertama putus tahun 2022 yang kemudian mengajukan upaya hukum kasasi tanpa melalui pengajuan banding yaitu sejumlah 1 perkara. Adapun perkara banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan kemudian mengajukan upaya hukum kasasi yaitu sejumlah 39 perkara.

Putusan kasasi yang turun dari Mahkamah Agung RI dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022 adalah sejumlah 38 perkara, dengan rincian 7 perkara diajukan kasasi tahun 2021 dan 31 perkara diajukan kasasi tahun 2022.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2022 terdapat 3 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut keduanya merupakan perkara register tahun 2016, 2021 dan 2022 yang kemudian baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2022.

Terdapat pula 3 putusan peninjauan kembali yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana 1 perkara diajukan PK pada tahun 2011 dan 2 Perkara diajukan PK pada tahun 2022.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2022 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12



Surabaya, namun masih terdapat 2 perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2022 Putusannya belum turun.

Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		JUMLAH
Banding		
Pidana Militer		6
Pidana Umum		36
Kasasi		
Pidana Militer		3
Pidana Umum		37
PK		
Pidana Militer		-
Pidana Umum		3
Jumlah		85

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan

Perkara Putus	Perkara Telah BHT	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
177 Perkara	118 Perkara	85 Perkara	86 Terdakwa

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Diantara 118 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap, tercatat 86 Terdakwa yang telah menjalani eksekusi, sisanya 32 perkara belum dieksekusi.

Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dari 32 perkara BHT yang belum dieksekusi tersebut terdapat 4 perkara desersi dan 28 perkara pidana kejahatan lain. Perkara desersi terdiri dari 4 perkara desersi inabsensia.

Terhadap 4 perkara desersi inabsensia ini belum dapat dilakukan eksekusi dikarenakan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.



Adapun terhadap 28 perkara lain yang belum dieksekusi dikarenakan Perkara-perkara ini sedang dalam proses eksekusi yang akan dilaksanakan di tahun 2022.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja peyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan tugas pokok organisasi selama tahun 2022 adalah sebagaimana diuraikan berikut :

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2021 sejumlah 15 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan.



15 sisa perkara ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2022 yaitu :

- 1 perkara diregister bulan Desember 2021 dan putus bulan Februari 2022.
- 1 perkara diregister bulan Desember 2021 dan putus bulan Maret 2022.
- 2 perkara diregister bulan Desember 2021 dan putus bulan April 2022.
- 2 perkara diregister bulan November 2021 dan putus bulan Februari 2022.
- 2 perkara diregister bulan November 2021 dan putus bulan Maret 2022.
- 1 perkara deregister bulan November 2021 dan putus bulan Januari 2022.
- 4 perkara diregister bulan Oktober 2021 dan putus bulan Januari 2022.
- 1 perkara diregister bulan Oktober 2021 dan putus bulan Februari 2022.
- 1 perkara diregister bulan September 2021 dan putus bulan Januari 2022.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.



Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	≤ 3 Bulan	4 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	7	1	0	0	8
Februari	6	0	0	0	6
Maret	9	2	0	0	11
April	29	2	0	0	31
Mei	7	2	0	0	9
Juni	20	7	0	0	27
Juli	12	1	0	0	13
Agustus	4	4	0	0	8
September	19	2	0	0	21
Oktober	15	4	0	0	19
November	10	0	0	0	10
Desember	13	1	0	0	14
Jumlah	151	26	0	0	

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2022 sebanyak 177 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga prosentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 177 perkara yang terdiri dari 159 perkara kejahanan, 6 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 12 perkara pelanggaran. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 85 perkara dengan rincian upaya hukum banding 42 perkara, upaya hukum kasasi 43 perkara dan upaya hukum Peninjauan kembali 3 perkara.

Adapun di tahun 2022 ada 1 perkara putus yang berlanjut hingga ke upaya hukum peninjauan kembali, namun terdapat 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali di tahun 2022 dimana perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2016 dan 2021. Sehingga dalam tahun 2022, perkara kejahanan yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya berjumlah 92 perkara.



B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 48 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 48 Putusan banding tersebut 6 perkara tahun 2022 menyatakan menerima dan 40 perkara tahun 2022 mengajukan upaya hukum kasasi (1 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama), 2 perkara putus masih dalam proses untuk pembacaan putusan banding.

C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 38 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 38 Putusan kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 80%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2022 sejumlah 208 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 177 perkara dan sisa perkara sebanyak 31 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 85,10 % dan sisa perkara



sebesar 14,9 %. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

C. PELAYANAN SIDANG KELILING

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Dari 35 perkara yang diagendakan untuk diselesaikan melalui sidang keliling, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 33 perkara.

Kegiatan sidang keliling ditujukan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

- Lokasi Kesatuan Terdakwa jaraknya relatif jauh dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- Jumlah Saksi yang relatif cukup banyak dan domisilinya relatif jauh jaraknya dari tempat persidangan di pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	Senin s.d Kamis / 11 s.d 14 April 2022 Bertempat di PA Malang	13 Perkara	13 Perkara
2	Selasa s.d Jumat / 12 s.d 15 Juli 2022 Bertempat di PA Malang	11 Perkara	10 Perkara
3	Senin s.d jumat / 17 s.d 21 Oktober 2022 Bertempat di PA Malang	11 Perkara	10 Perkara
4	Selasa s.d Jumat / 8 s.d 11 November 2022 Bertempat di Madivif -2 Kostrad Malang (percepatan perkara)	8 Perkara	5 Perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan.

Adapun untuk beberapa perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :



- Saksi yang masih belum dapat hadir walaupun sudah dipanggil secara sah sesuai undang-undang.
- Terdakwa tidak hadir saat tuntutan.
- Penasihat Hukum mengajukan pledoi.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap). Tahun 2022 berjumlah 43 orang, terdiri dari 33 orang pegawai organik, 9 orang PTT dan 1 (satu) orang pegawai BP (diperbantukan) dari Pengadilan Militer III-16 Makasar.

SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PTT belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PTT dalam struktur organisasi. Secara rinci SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	0 Orang
		Pokkimmil	4 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	0 Orang
		Panmud Hukum	0 Orang
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analis Perkara Pengadilan	1 Orang



		Pengelola Perkara Pidana Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengelola Perkara	2 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	0 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 Orang
		Pengolah Informasi dan Komunikasi	1 Orang
		Penyusunan Laporan Keuangan	1 Orang
		Pranata Kearsipan	1 Orang
		Pengelola Barang Milik Negara	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	1 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana	1 Orang
		Pengadministrasi Persuratan	2 Orang
		Pengadministrasi Kepegawaian	1 Orang
		Pengelola Sistem dan Jaringan	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	0 Orang
		Pustakawan	0 Orang
		Pranata Computer	0 Orang
		Bendahara	1 Orang
		Pranata Peradilan	0 Orang

A. DATA SEBARAN PEGAWAI

1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

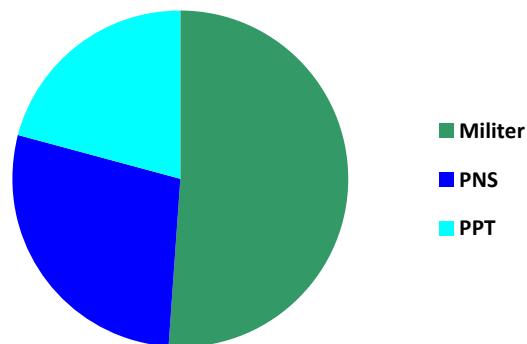
Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PTT. Tenaga PTT ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Percentase (%)
1	Militer	22	55,26
2	PNS	12	21,06
3	PTT	9	23,68
Jumlah Total		43	100.00



Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	20	2
2	PNS	3	9
3	PPT	7	2
Jumlah Total		30	13

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	-	-
2	Letnan Kolonel	3	-
3	Mayor	2	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	2	-
6	Peltu	3	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	2	-



9	Serka	2	-
10	Sertu	1	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	-	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	2	-
15	Penata Tk.1 (III/d)	-	3
16	Penata (III/c)	-	1
17	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	3
18	Penata Muda (III/a)	-	2
19	Pengatur (II/C)	-	3
Jumlah Total		22	12

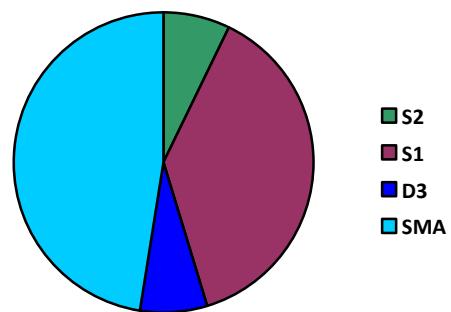
4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PTT, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	S-2	3	-		3
2	S-1	10	5	1	16
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	8	4	8	20

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan





Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PTT	
1	20 – 30 Tahun	3	3	3	9
2	31 – 40 Tahun	2	2	5	9
3	41 – 50 Tahun	13	3	1	17
4	51 – 58 Tahun	4	3	-	7

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan



tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2022 terdapat 8 Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2022.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Purwadi, S.H. Mayor Chk / 21960345950374	Sekretaris	Miltama/Sprin/52/KP.04.5./ II/2022	07-02- 2022
2	Gede Made Suryawan, SH.,MH Letnan Kolonel Chk/636364	Anggota Pokkimmil Gol. V	202/KMA/SK/VI/2002 22 Juni 2022	12-07- 2022
3	Dedy Darmawan, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk / 11990006941271	Anggota Pokkimmil Gol. V	202/KMA/SK/VI/2002 22 Juni 2022	12-07- 2022
4	Khairil Anwar, S.Sos,SH.,MH. Mayor Chk / 11030033700382	Panitera	284/DjMT/Ratgas/VII/2022 8 Juli 2022	01-08- 2022
5	Akhmad Efendi, SH.,MH. Letkol Chk/ 11020002860972	Anggota Pokkimmil Gol. V	143/DjMT/Ratgas/KP. 04.6/VII/2022 4 Juli 2022	30-08- 2022
6	Prima Ledy Yudhoyono, S.T.Han., S.H. Kapten /11130023470589	Chk Panmud Pidana	285/Djmt/ KEP/KP.00.3/VII/2022 8 Juli 2022	08-07- 2022
7	Rony Suryandoko, S.I.P.S.H.,M.Han Letkol Chk / 11000045041178	Wakil kepala	292/DjMT/Ratgas/KP.04.1/XI/2022 24 November 2022	22-12- 2022
8	Farma Nihayatul Aliyah, S.H Kolonel Chk (K) / 11980035580769	Kepala	292/DjMT/Ratgas/KP.04.1/XI/2022 24 November 2022	22-12- 2022



2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2022 terdapat 9 orang pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Anggraini Esti Rahayu, A.Md. CPNS Gol.II/c / 199701262022032011	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	2695/SEK/CPNS.04.1 SK/II/2022	01-04-2022
2	Dina Astari, A.Md. CPNS Gol. II/c / 199706162022032017	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	2695/SEK/CPNS.04.1 SK/II/2022	01-04-2022
3	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519169	Panitera	284/DjMT/Ratgas/VII/2022 8 Juli 2022	01-08-2022
4	Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878	Anggota Pokkimmil Gol. V	143/DjMT/Ratgas/KP. 04.6/VII/2022 4 Juli 2022	04-08-2022
5	Ahmad Suryadi, S.H. Letnan Satu Chk 21000075960980	Panmud Pidana (Tugas BP)	165A/DjMT/Ratgas/KP.00.I /VII/2022 8 Juli 2022	09-08-2022
6	Suhendra, S.H. Pelda / 21010150930781	Panitera Pengganti	285/DjMT/Kep/KP.00.3/ VII/2022 8 Juli 2022	22-08-2022
7	Nur Arifin Pratu / 31150138760396	Pengadmini strasi Persuratan	945/SEK/KP.I/SK/VII/2022 28 Juli 2022	01-09-2022
8	Gigih Dayu Priambudi, S.H. Lettu Sus / 544097	Panitera Pengganti Gol. VIII	414/DjMT/KEP/KP.00.3/XI/2022 29-11-2022	29-11-2022
9	Sugeng Aryanto, S.H Letkol Chk / 11980058680275	Kepala	292/DjMT/Ratgas/KP.04.1/XI/2022 24 November 2022	22-12-2022

C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.



Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2022 terdapat 3 orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat reguler. Pegawai yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 3 orang personel militer.

Kenaikan pangkat regular ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki nilai yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Amin Matsuri, S.H. Kopda / 31100130381289	Serda	Kep/615-33/VII/2022 26-07-2022	26-07-2022
2	Slamet Serma / 21020097980681	Pelda	Kep/816-33/IX/2022 7 September 2022	01-10-2022
3	Nur Arifin Pratu / 31150138760396	Praka	Kep/816-33/IX/2022 7 September 2022	01-10-2022



2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Pada Tahun 2022, terdapat 3 orang pegawai yang menerima kenaikan jabatan. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan jabatan secara rinci diuraikan dalam table berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS Gol. III/d / 197804082006042001 Kasubbag PTIP	Sekretaris	944/SEK.KP.I/SK/VII/202 2 22-07-2022	01-08-2022
2	Norma Azurah, SE.I PNS III/a / 199605022020122014 Verifikator Keuangan	Penyusun Laporan Keuangan, Subbag Umum dan Keuangan	W3.Mil/43/KP.04.06/ X/2022 12-10-2022	01-11-2022
3	Safril Adi Husada A.Md. PNS II/c / 198804262020121007 Pengadministrasi Register Perkara, Panmud Hukum	Pengelola Sistem dan Jaringan, Subbag PTIP	W3.Mil/43/KP.04.06/ X/2022 12-10-2022	01-11-2022

D. PENSIUN

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinasnya pada usia 58 tahun.

Pada Tahun 2022 tidak terdapat pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pension.



E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.11 Daftar Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Latsar CPNS Mahkamah Agung RI	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Online Satker 31 Januari sd 30 April 2022	Norma Azurah, S.E.I CPNS III/a
2	<i>Champion Meeting-Court Excellent Training</i>	Pusdiklat Menpim MA RI	13 sd 17 Januari 2022	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
3	Pelatihan Training Of Trainers (TOT) Pengajar MA RI	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	24 sd 28 Januari 2022	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d
4	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengadilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Tahap I (Online) 7 s.d 11 Februari 2022 Tahap II (Klasikal) 14 s.d 19 Februari 2022	- Mayor Chk Khairil Anwar, S.Sos.SH.MH. - Peltu Rudianto, SH - Peltu Faried Sunaryunan, SH.
5	Latsar CPNS Mahkamah Agung RI	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Online Satker 21 Februari sd 31 Mei 2022	Safril Adi Husada CPNS II/c
6	<i>Profile Assesment Test</i>	Dirjen Badilmiltun MARI	24 Februari 2022	Letkol Chk Dedy Darmawan, SH.MH.
7	Pelatihan singkat PP 4 peradilan se	Pusdiklat Balitbang	Gel I : 10 s.d 17 Maret 2022	Gel. : - Mayor Chk Khairil



	Indonesia	Kumdil MARI	Gel. II : 17 s.d. 24 Maret 2022 Gel.III : 24 s.d 31 Maret 2022	Anwar,S.Sos,SH.MH - Peltu Rudianto, SH Gel II : - Kapten Chk Prima Ledy Yudoyono,SH - Peltu Faried Sunaryunan, SH Gel. III - Peltu Moh.Fauzan
8	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Tahap I Online, Satker 1,5 Maret 2021	Mayor Chk Ujang Taryana, SH,MH.
9	Pelatihan Program PPC Peradilan Militer	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Bogor, 28 Maret s.d 1 April 2022	- Letkol Chk Rony Suryandoko,S.IP,SH, M.Han. - Letkol Chk IG Made Suryawan,SH.MH. - Letkol Chk Ahmad Efendi, SH. MH.
10	Dikcaba	Diklat TNI AD	18 Mei s.d. 26 Juli 2022	Kopda Amin Matsuri, SH
11	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan	Balitbang Kumdil MARI	Tahap I, Online 7 s.d 10 Juni 2022 Tahap II, Online Clasical 13 s.d. 20 Juni 2022	Letkol Chk (K) Kus Indrawati, SH.MH.
12	Pelatihan Sertifikasi Profesional Trainer	Balitbang Kumdil MARI	Bogor 20 s.d. 28 Juli 2022	Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS-III/d
13	Pelatihan Teknis Yudisial Perkara Narkotika	Balitbang Kumdil MARI	Online, Satker 11 s.d. 25 Juli 2022	Letkol Chk Ahmad Efendi, SH.MH. Major Chk Musthofa, SH.MH.
14	Bimtek SKP	Dilmilti III Sby	Malang, 20 s.d. 22 Juli 2022	Rijani Widyanti, PNS III/d, Melanti Puspura, PNS III/c Praka Wahyu Ari Wijaya
15	Pelatihan Management ASN Tahun 2022	Balitbang Kumdil MARI	Online, 22 Juli s.d. 1 Agustus 2022	Rijani Widyanti, PNS III/d
17	Pelatihan Yekmis Yudisial Hakim Senior Peradilan Militer se Indonesia	Pusdiklat Balitbang Kumdil MARI	Tahap I, 24 s.d 20 Okt 2022 Tahap II, Bali 31 Okt s.d 5 Nov 2022	- Kolonel Chk Farma Nihayatul A, SH.MH. - Letkol Chk Rony Suryandoko,S.IP,SH, M.Han.



18	Penyusunan Pelatihan Mulok Pusdiklat Menpin MARI	Pusdiklat Menpin MARI	Jakarta, 7 s.d 9 Nov 2022	Firda Nuril Hanifah, S.Si., PNS III/d3
----	--	-----------------------	---------------------------	--

Tabel III.12 Daftar Kegiatan Bimbingan Teknis Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN TA 2021	Pengadilan Tinggi Surabaya	25 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d - Setijo Utomo, PNS-III/b - Norma Azurah, S.E.I. CPNS-III/a
2	Bimbingan Teknis Accessor di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 22 Maret 2022	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/c
3	Bimbingan Teknis Panitera /PP Peradilan Militer TA. 2022	Dirjen Badilmiltun MARI	Bandung Online, 23 s.d. 25 Mei 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Chk Khairil Anwar, S.Sos, S.H., M.H. Peltu Rudianto, SH Peltu Faried Sunaryunan, S.H.
4	Bimbingan Hakim Militer	Dirjen Badilmiltun MARI	Online, Satker 22 s.d 24 Juni 2022	Letkol Chk I Gede Made S.SH.MH. Letkol Chk Dedy Darmawan, SH,MH.
5	Bimtek Kepaniteraan Dilmiltama TA. 2022	Dilmiltama	Online, 24 s.d. 26 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kapten Sus Kholip, SH - Peltu Rudianto, SH - Melanti Puspura, SE, PNS III/c
6	Bimtek Kesekretariatan TA. 2022	Dilmiltama	Online, 29 s.d 31 Agustus 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Firda Nuril Hanifah, S.Si. PNS III/d - Rijani Widyanti, PNS III/d
7	Bimtek Kesekretariatan TA. 2022	Kadilmilti III Surabaya	Trawas Mojokerto, 16 s.d 18 Nov 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ainur Rofiq, SE, PNS Gol.III/d - Norma Azurah, SEI. PNS III/a - Praka Nur Arifin



Tabel III.13 Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai

No	Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Focus Group Discussion (FGD)	Balitbang Kumdil MARI	Online 20 April 2022	Major Chk Khairil Anwar, S.Sos, S.H., Kapten Prima Ledy Yudoyono, S.T.Han,S.H.
2	Seminar Focus	Dilmilti III Surabaya	Surabaya 16 Maret 2022	Ainur Rofiq, S.E. PNS III/d
3	<i>Focus Group Discussin</i>	Kapuslitbang Diklat Kumdil MARI	Online 20 Apil 2022	- Mayor Chk Khairil Anwar
4	Penyusunan SAKTI	PT Surabaya	Trawas Mojokerto 20 s.d. 23 Juni 2022	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d Serma Slamet
5	Focus Group Discussion (FGD)	Balitbang Kumdil MARI	Surabaya 22 Juni 2022	Letkol Chk Rony Suryandoko, SIP,SH,MH. Mayor Chk Musthofa, SH,MH.
6	Sosialisasi dan implementasi layanan KPPN Surabaya II	KPPN Surabaya II	Surabaya 13 Juli 2022	Setijo Utomo, PNS III/b
7	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III TA. 2022	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sby	Pengadilan Tinggi Sby, 10 Okt 2022	- Pelda Slamet - Norma Azurah, SEI, PNS III/a
8	Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara akhir TA.2022	KPPN Surabaya II	KPPN Sby II, 13 Okt 2022	- Setijo Utomo, PNS III/b. - Norma Azurah, SEI, PNS III/a

Kegiatan lain yang telah dilakukan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Kabadan Balitbang Diklat Kumdil Nomor 661/Bld/S/8/2022 tanggal 11 Agustus 2022, telah selesai melaksanakan magang peserta program Pendidikan dan Pelatihan PPC Terpadu Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan III sebanyak 7 (tujuh) orang dan telah di Wisuda pada tanggal 11 Oktober 2022.
2. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2151/SEK/ KP.01.2/9/2022 tanggal 27 September 2022, Pengadilan



Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan Pendataan Tenaga Non ASN sebanyak 9 (sembilan) orang dan telah sukses masuk dalam datan BKN.

3. Berdasarkan Surat Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 247/DjMT/Ratgas/KP.00.4/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima PB. Hakim Militer PPC III sebanyak 6 (enam) orang yang telah selesai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sambil menunggu Keputusan Priseden RI serta Ratgas dari Dirjen Badilmiltun untuk pelaksanaan tugas selanjutnya.

4. Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil MARI Nomor 1257/Bld/S/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima Magang Tahap I dari tanggal 2 November s.d. 2 Desember 2022, peserta program Pendidikan dan Pelatihan PPC Terpadu Calon Hakim Peradilan Militer Angkatan IV sebanyak 5 (lima) orang atas nama :

- 1) Muhamammd Nur Sakdi, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11040032050782;
- 2) Andhika Dimas Dwipa, S.H. Mayor Chk NRP 11090016420685;
- 3) Hendra Iskandar, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11130027681088;
- 4) Jasman, S.H. Kapten Chk NRP 11110038420787;
- 5) Nandar Fransiska, S.H. Kapten Chk NRP 11070077240186.



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA 2022 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/KP.04.6/I/2022 Tanggal 04 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2022. Dikarenakan adanya pergantian pejabat Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka diterbitkanlah kembali Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/13/KP.04.6/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2022 yang berlaku sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapat



Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA- SP DIPA- 005.01.2.663314/2022 tanggal 17 November 2021. Sepanjang tahun 2020, DIPA 01 mengalami dua kali revisi, yaitu revisi pada pagu belanja pegawai dan belanja barang.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 Rp. 8.286.271.000,- (Delapan Milliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah. Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp. 4.566.135.000 (Empat Milliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel IV.1 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi
Revisi Pertama	Pengadaan Rapid Test (Penyesuaian harga satuan)	5.000.000	4.500.000
	Belanja Gaji Pokok PNS (Penyesuaian harga satuan)	470.148.000	456.716.000
	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (Penyesuaian harga satuan)	28.060.000	40.061.000
	Belanja Tunjangan Anak PNS (Penyesuaian harga satuan)	9.233.000	10.664.000
	Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional PNS (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	2.131.080.000	410.944.000
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI (Pergeseran anggaran dalam POK)	2.761.360.000	2.761.360.000
	Belanja Keperluan Perkantoran (Perubahan	480.143.000	477.643.000



	harga satuan Air Minum dan Pengadaan/Penggantian Inventaris) Kode 521111 A		
	Belanja Barang Operasional Lainnya (Perubahan harga satuan) Kode 521119	2.860.000	5.385.000
	Belanja Keperluan Perkantoran (Perubahan harga satuan Lisensi Video Convergence) Kode 521111 B	6.000.000	3.975.000
	Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim (Tambah sewa rumah dinas hakim 1 O.T x Rp.6.480.000)	181.440.000	187.920.000
	Belanja Peralatan dan Mesin (Perubahan harga satuan pemeliharaan Printer dan AC Split)	165.303.000	161.323.000
Revisi Kedua	Revisi Pagu Minus Belanja Pegawai (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	4.895.031.000	2.895.031.000

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 2.895.031.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.611.104.000
53	Belanja Modal	Rp. 60.000.000
Jumlah		Rp. 4.566.135.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2022 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 203.783.635	Rp. 74.624.240	Rp. 0
Februari	Rp. 210.736.950	Rp. 79.994.627	Rp. 0
Maret	Rp. 209.817.950	Rp. 96.249.847	Rp. 0
April	Rp. 433.784.865	Rp. 161.417.028	Rp. 0



Mei	Rp.	214.476.515	Rp.	97.951.535	Rp.	10.000.000
Juni	Rp.	213.457.701	Rp.	94.093.487	Rp.	0
Juli	Rp.	435.824.568	Rp.	113.121.444	Rp.	0
Agustus	Rp.	214.963.878	Rp.	110.119.962	Rp.	0
September	Rp.	201.831.231	Rp.	129.176.466	Rp.	29.990.000
Oktober	Rp.	180.540.729	Rp.	133.893.301	Rp.	19.920.000
November	Rp.	179.987.729	Rp.	107.665.081	Rp.	0
Desember	Rp.	175.475.426	Rp.	355.059.584	Rp.	0
Jumlah	Rp.	2.874.681.177	Rp.	1.553.366.602	Rp.	59.910.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.566.135.000	100%
Realisasi	Rp. 4.487.957.779	98.29%
Sisa	Rp. 78.177.221	1.71%

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 98,29%

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2022 tanggal 17 November 2021. Sepanjang tahun 2022, DIPA 05 tidak mengalami revisi.

Dari DIPA 05 tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 163.140.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel IV.5 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 4.622.000	Rp. 0
Maret	Rp. 9.876.000	Rp. 0
April	Rp. 5.096.750	Rp. 20.180.000
Mei	Rp. 10.152.000	Rp. 0
Juni	Rp. 5.045.500	Rp. 0
Juli	Rp. 9.929.800	Rp. 20.180.000
Agustus	Rp. 9.757.000	Rp. 0
September	Rp. 10.107.000	Rp. 0
Okttober	Rp. 10.044.500	Rp. 20.180.000
November	Rp. 10.005.000	Rp. 0
Desember	Rp. 14.922.000	Rp. 0
Jumlah	Rp. 99.557.550	Rp. 60.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 163.140.000	100%
Realisasi	Rp. 160.097.550	98.14%
Sisa	Rp. 3.042.450	1.86%

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 sebesar 98.14 %

3. KEUANGAN DARI PERKARA

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-12 tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.



Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2022, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.480.000
2	Pelanggaran	Rp. 112.500
3	Denda Kejahatan	Rp. 4.000.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 3.050.000
Jumlah Total		Rp 8.642.500

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabaya dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL



(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2022, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 3 kegiatan belanja modal yaitu pengadaan Perangkat Pengelola Data dan Komunikasi, Pengadaan Sarana Disabilitas dan Prasarana Disabilitas. Pengadaan sarana perangkat pengolah data komunikasi berupa printer yang diperuntukkan bagi Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan pengadaan Sarana Disabilitas dengan nilai pagu anggaran Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Pengadaan Prasarana Disabilitas dengan nilai pagu anggaran Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Rincian pengadaan sarana dan prasarana sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.

Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Nilai
1.	Printer 2 unit @Rp.5.000.000 Realisasi : Pelaksanaan bulan Mei 2022 Total Belanja 2 Unit = Rp.8.873.874. PPN = Rp.990.991 PPh Pasal 22 = Rp.135.135 Grand Total = Rp.10.000.000 Sisa Pagu = Rp.0	Rp. 10.000.000
2.	Sarana Disabilitas Realisasi: Pelaksanaan bulan Oktober 2022 Total Belanja = Rp.17.587.026 PPN = Rp.1.974.055 PPh 22 = Rp.358.919 Grand Total = Rp.19.920.000 Sisa Pagu = Rp.80.000	Rp. 20.000.000
	Prasarana Disabilitas	Rp. 30.000.000
Total Nilai		Rp. 60.000.000



2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Gedung kantor ini berada dalam satu kompleks dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha negara Surabaya.

Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdiri di atas tanah seluas 11.986 m² (Sebelah ribu Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi). Gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada satu lokasi dengan gedung kantor Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan gedung kantor Pengadilan Tata Usaha Negara. Status kepemilikan tanah lokasi gedung pengadilan-pengadilan di atas berdasarkan sertifikat atas nama Ditjen Badilmiltun.

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi
- 3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2020 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai



dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas :

Tabel IV.9 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Digunakan untuk operasional jabatan Kepala
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.10 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp. 361.400.000
3.	Kendaraan dinas roda 4	1	Unit	Sewa
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp. 77.450.000
Total Nilai				Rp. 438.850.000

2) Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

Tabel IV.11 Daftar Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Scanner	5	Unit	Rp. 24.683.250
2.	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp. 24.915.000
3.	Facsimile	2	Unit	Rp. 7.100.000
4.	PC	34	Unit	Rp. 435.593.300
5.	Laptop	23	Unit	Rp. 365.639.550
6.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Set	Rp. 102.352.500
7.	Printer	23	Unit	Rp. 65.165.100



8.	Server	3	Unit	Rp. 223.655.000
9.	Router	1	Unit	Rp. 9.955.000
Nilai Total				Rp. 1.249.058.700

3) Inventaris Kantor Lainnya

Tabel IV.12 Daftar Inventaris Kantor Lainnya

No	Uraian	Jumlah		Nilai
1.	Penyemprot Tangan	2	Unit	Rp. 990.000
2.	Mesin Ketik Manual	1	Unit	Rp. 1.500.000
3.	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	1	Unit	Rp. 2.200.000
4.	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp. 9.900.000
5.	Mesin Fotocopy	2	Unit	Rp. 93.598.350
6.	Lemari Besi/Metal	12	Unit	Rp. 23.525.000
7.	Lemari Kayu	13	Unit	Rp. 53.210.660
8.	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp. 34.627.000
9.	Brandkas	1	Unit	Rp. 4.000.000
10.	Cash Box	1	Unit	Rp. 990.000
11.	Papan Visual	12	Unit	Rp. 3.821.400
12.	Movitex Board	1	Unit	Rp. 17.630.000
13.	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp. 3.115.000
14.	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp. 1.479.500
15.	Mesin Laminating	1	Unit	Rp. 2.129.050
16.	Meja Kerja Kayu	71	Unit	Rp. 143.583.540
17.	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp. 9.620.000
18.	Alat Perekam Suara	6	Unit	Rp. 11.979.000
19.	Kursi Besi/Metal	43	Unit	Rp. 71.554.000
20.	Kursi Kayu	15	Unit	Rp. 48.245.910
21.	Sice	5	Unit	Rp. 34.895.000
22.	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp. 58.755.730
23.	Meja Rapat	2	Unit	Rp. 23.679.500
24.	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp. 1.630.000
25.	Meja Telepon	1	Unit	Rp. 1.382.700
26.	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp. 13.640.330
27.	Partisi	4	Unit	Rp. 67.123.980
28.	Mesin Penghisap Debu	2	Unit	Rp. 3.342.900
29.	Mesin Pemotong Rumput	4	Unit	Rp. 14.928.000
30.	Air Cleaner	1	Unit	Rp. 19.772.500
31.	Lemari Es	3	Unit	Rp. 13.447.500
32.	A.C. Split	44	Unit	Rp. 297.078.100
33.	Kitchen Set	1	Unit	Rp. 9.500.500
34.	Televisi	5	Unit	Rp. 39.897.000
35.	Sound System	1	Unit	Rp. 39.999.300
36.	Tiang Bendera	6	Unit	Rp. 7.246.000
37.	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp. 2.970.000
38.	Dispenser	7	Unit	Rp. 11.371.300
39.	Palu Sidang	4	Unit	Rp. 849.200
40.	Lambang Instansi		Unit	Rp.



41.	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14.905.000
42.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13	Unit	Rp.	48.977.600
43.	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5.447.200
44.	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4.950.000
45.	Mesin Pemotong Biasa	1	Unit	Rp.	2.948.000
46.	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9.872.500
47.	Alat Studio Lainnya	1	Set	Rp.	4.950.000
48.	Genset	1	Unit	Rp.	198.969.000
49.	Kursi Dorong	15	Unit	Rp.	13.745.000
50.	Meja Kerja	2	Unit	Rp.	16.310.000
51.	ATR	1	Unit	Rp.	26.994.550
52.	CCTV	1	Unit	Rp.	19.965.000
53.	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	19.712.000
54.	Mesin Poles	2	Unit	Rp.	49.896.000
55.	Walker Tanpa Roda	1	Unit	Rp.	920.000
56.	Rolator Beroda	1	Unit	Rp.	1.000.000
57.	Tongkat Piramid	1	Unit	Rp.	925.800
58.	Vilcare Dolpin Exclusive Hearing Aid	1	Unit	Rp.	1.525.000
59.	Papan Priority Seat Huruf Braille	1	Unit	Rp.	910.000
60.	Papan Priority Seat	1	Unit	Rp.	910.000
61.	Tiang Pembatasan Stainless	1	Unit	Rp.	915.000
62.	Sofa Pengunjung 4 seat	1	Unit	Rp.	3.800.000
63.	Tongkat Kruk	1	Unit	Rp.	1.000.000
64.	Kursi Roda	1	Unit	Rp.	2.040.600
65.	Tab Touchscreen 10 inch	1	Unit	Rp.	4.000.000
Nilai Total				Rp.	1.699.302.200

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp. 197.568.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 161.323.000,- (Seratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).



4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2022 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. e-Court merupakan upaya



untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

2. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib



administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/HK.04/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2022 adalah versi 5.1.0.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2022 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 85.10 %.

3. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Monitoring Implementasi SIPP (MIS)



- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
 - Sistem Aplikasi Satker (SAS)
 - Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI)
 - Sistem Pengelolaan rekening Terintegrasi (SPRINT)
 - Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - Elektronik Integrated Planning System (e-IPLANS)
- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).
- b) Di Bidang Perkara
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
 - Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan (SIPTERA)
- c) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).



4. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi. Terdapat 9 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT. Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Kecepatan akses 100 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 30
- Network monitoring MRTG
- Support network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99,5 %

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.



Tabel IV.13 Spesifikasi Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Controller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant		
Server Pendukung SIPP	OS Ubuntu	1	Unit
	Merk Fujitsu		
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimeline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
Server Pendukung e-Court	Warranty 3/3/3	1	Unit
	Merk Fujitsu tipe TX1330M4		
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan membangun sarana dan prasarana serta mengevaluasinya dengan melakukan penilaian internal dan eksternal.

Penilaian pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu melalui APM dan ISO. Sarana dan prasarana pelayanan pelayanan publik yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu PTSP, Pembangunan ZI dan Inovasi yang berupa aplikasi.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

- Area 1 : Kepemimpinan
- Area 2 : Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara
- Area 3 : Sarana Dan Prasarana
- Area 4 : Teknis Peradilan
- Area 5 : Layanan Pengadilan



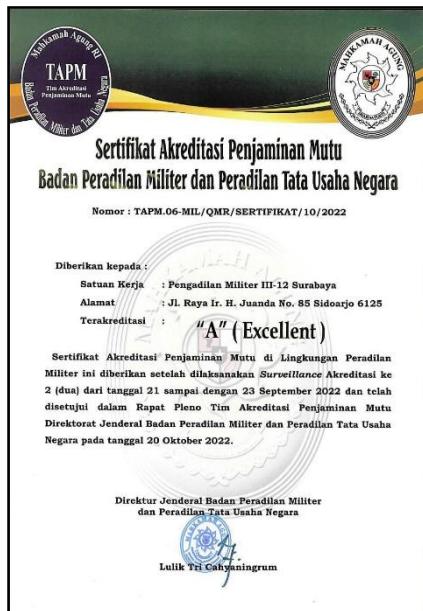
Area 6 : Kepegawaian Dan tata Laksana

Area 7 : Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Pada tanggal 21 s.d. 23 September 2022 Tim Akreditasi Penjaminan Mutu dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI melaksanakan *surveillance* akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Surat Tugas Dirbinganisminmil Nomor 221/DjMT/Ratgas/KP.01.3/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Pelaksanaan *Surveillance* Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Surveillance akreditasi penjaminan mutu ini merupakan proses sistematis dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria penilaian dipenuhi. Dari hasil audit *surveillance* akreditasi penjaminan mutu, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai "A" (*Excellent*). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu





B. ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu pengadilan dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK



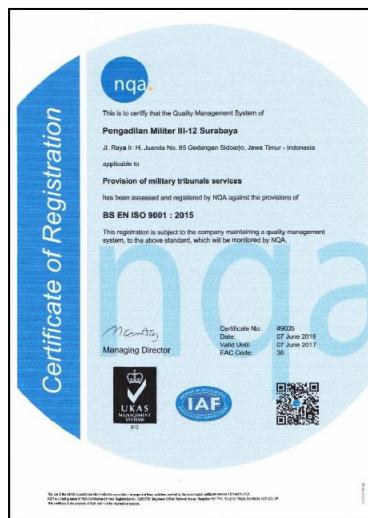
Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.

C. SERTIFIKASI ISO

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.



Gambar V.3 Sertifikat ISO 9001:2015



D. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi Dan Pengadilan Militer, maka di tahun 2018 Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban



administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tim PTSP Nomor W3-Mil01/01.a/PS.02/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Salinan Putusan	3 layanan	Kepaniteraan
2	Petikan Putusan	1 layanan	Kepaniteraan
3	Akta BHT	1 layanan	Kepaniteraan
4	Salinan Putusan Kasasi	1 layanan	Kepaniteraan

E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.



1. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

2. Aplikasi ASK-TI

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.



3. Aplikasi SUKMA

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

4. Aplikasi SIPDIL

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

5. Aplikasi HARUM

Aplikasi HARUM merupakan aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelayanan publik Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Mei 2021. HARUM adalah kepanjangan dari Halam Forum.

Aplikasi HARUM dimaksudkan sebagai media berbagi informasi dan diskusi tentang hukum dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi HARUM ini didasari oleh beberapa pemikiran yaitu :

1. Banyaknya permohonan data dari mahasiswa.

Sehubungan hal ini, dirasa akan memberi manfaat lebih apabila Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan media bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mencari informasi dan diskusi hukum dengan Hakim (pengampu yang ditunjuk) yang notabene memiliki keilmuan dan pengalaman dalam bidang hukum.

2. Kondisi pandemi.

Melalui media ini, mahasiswa dan masyarakat umum dapat tetap memperoleh informasi tanpa harus datang dan berinteraksi dengan petugas, sehingga tetap terjaga protokol kesehatan.



Aplikasi HARUM menyediakan layanan diskusi dan berbagi informasi dari masyarakat maupun dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi HARUM dijalankan dengan menunjuk Hakim sebagai pengampu atau narasumber.

6. Aplikasi SIPTERA

Aplikasi SIPTERA merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Juli 2021. SIPTERA adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan.

Aplikasi SIPTERA adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan antara *database* dengan *Microsoft Word* untuk membantu memudahkan kepaniteraan dalam membuat akta-akta dan persuratan. SIPTERA merupakan aplikasi internal kepaniteraan pertama di Dilmil III-12 Surabaya. Aplikasi SIPTERA dibangun dengan bahasa pemrograman SQL melalui *Microsoft Access* untuk kemudahan pengaturan *database*.

Pada SIPTERA terdapat tiga versi untuk setiap pihak berperkara, yaitu versi terdakwa, versi penasihat hukum dan versi oditur militer. Akta-akta dan surat- surat dari aplikasi SIPTERA bergantung pada siapa yang mengajukan upaya hukum. Dengan demikian akan meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses pembuatan akta dan surat yang dimaksud. SIPTERA sementara direncanakan dalam tiga kali tahapan. Tahap pertama adalah versi yang sedang digunakan dan dikembangkan saat ini di Kepaniteraan Dilmil III-12 Surabaya, tahap kedua yaitu integrasi dengan SIPP sehingga proses pengisian atau manajemen *database* bisa berjalan lebih efektif dan efisien dan tahap ketiga adalah tambahan Fitur BAS dan Konsep Putusan secara otomatis.



F. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kunjungan / Magang Mahasiswa

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel V.2 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Katholik Darma Cendika	Magang / KKL	15 Februari 2022 s.d 17 Juni 2022	Alviano Boyko Wijaya
2	Univ. Jember	Penelitian	02 Maret 2022	Widyawati Pustika Deni
3	Univ. Wijaya Kusuma Surabaya	Magang / KKL	15 Februari 2022 s.d 17 Juni 2022	- Nandung Zevanya B - Lia Ningrum - Amailia Krisdiana A - Ayu Candra Eka K - Firna Alfia Nurwalidia
3	Univ. Islam Sunan Agung (Unissula)	Riset Program S2	27 Mei 2022	Ragil Jaka Utama
4	Univ. Maarif Latif (UMAHA)	Magang / KKL	1 (satu) semester	- Moh. Badar - Kurniawan Sufiyanto
5	Univ. Katholik Darma Cendika	Presentasi Laporan Magang	29 Juni 2022	Alviano Boyko Wijaya



2. Peminjaman Ruang Sidang

Pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Mahasiswa, yaitu dalam hal peminjaman ruang sidang untuk keperluan akademik.

Tabel V 3 Data Peminjaman Ruang Sidang

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	konsultasi dan peminjaman Ruang sidang dalam rangka keikutsertaan pada kegiatan National Moot Court Competition (NMCC) Peradilan Militer di STHM Ditkumad dan Pengadilan Militer Utama MA RI	30 Oktober 2022	12 (dua belas) orang mahasiswa
2	Komunitas Peradilan Semu Bela Negara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur	Perekaman Video Tahap Final NMCC Piala K.H Achmad Dahlan II	8 dan 15 September 2022	15 orang mahasiswa
3	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	National Moot Court Competition (NMCC) Peradilan Militer.	3 dan 7 November 2022	12 orang mahasiswa

G. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2022 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.



Survei dilaksanakan terhadap 50 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/08/PL.09/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Dilmil III-12 Surabaya.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.1 di bawah ini.

Tabel V.4 Survei IKM Tahun 2022

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2022 s.d. 6 April 2022	92.51	Sangat Baik
2	Triwulan II	1 April 2022 s.d 5 Juli 2022	94.01	Sangat Baik
3	Triwulan III	4 Juli 2022 s.d. 5 Oktober 2022	96.12	Sangat Baik
4	Triwulan IV	3 Oktober 2022 s.d. 30 Desember 2022	98.90	Sangat Baik

2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2022 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.2 di bawah ini.

Tabel V.5 Survei IPK Tahun 2022

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	3 Januari 2022 s.d. 6 April 2022	92.56	Sangat Baik
2	Triwulan II	1 April 2022 s.d 5 Juli 2022	96.25	Sangat Baik
3	Triwulan III	4 Juli 2022 s.d. 5 Oktober 2022	95.06	Sangat Baik
4	Triwulan IV	3 Oktober 2022 s.d. 30 Desember 2022	99.06	Sangat Baik



BAB VI PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2022 yaitu :



1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/08/PS.01/VII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2022, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- 1) Laporan keuangan belum bisa dikerjakan dikarena menunggu proses rekonsiliasi dari KPPN
- 2) Belum dapat terealisasinya semua rencana penyerapan anggaran diawal.
- 3) Adanya perbedaan data antara SKPP yang dikirim oleh Satker asal dengan data yang ada dalam OM SPAN KPPN Surabaya II

b) Pengawasan Bidang Teknologi Informasi Dan SIPP

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang IT adalah :

- 1) Jumlah pegawai di bagian TI sebanyak 4 orang, namun belum ada yang memiliki dasar pendidikan TI.
- 2) Aplikasi Siskominfosid (Sistem Informasi dan Komunikasi persidangan) tidak berfungsi dengan baik
- 3) Tidak adanya koordinasi antara Panitera Pengganti dan Majelis Hakim dalam mengupload putusan Aplikasi SIPP



c) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Masih belum ada penambahan fitur di aplikasi SIKEP yang dapat digunakan untuk input data pendidikan dan KGB bagi pegawai militer.
- 2) Jumlah Panitera Pengganti masih dirasa kurang. Masing belum seimbang dengan jumlah beban perkara.

d) Pengawasan Bidang Administrasi Umum

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang administrasi umum adalah :

- 1) Ruang arsip masih belum tertata rapi. Masih terdapat berkas yang bertumpukan.
- 2) Masih ada pemegang BMN yang tidak memiliki surat penyerahan tanggung jawab BMN.

e) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- 1) Masih terdapat BAS yang belum selesai tepat waktu.

f) Pengawasan Bidang Pelayanan Publik

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang pelayanan publik adalah :

- 1) Masih menyatunya monitor aplikasi survei dengan monitor buku tamu siratmil.
- 2) Petugas PTSP belum bisa memahami pelaksanaan pelayanan publik.



2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/09/PS.01/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/PS.01/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2022 tim pelaksana penanganan gratifikasi tidak mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor W3-Mil01/10/PS.01/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.



- d) Menyusun SOP.
- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/01/PS.00/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2022 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel VI.1 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0



B. PENGAWASAN EKSTERNAL

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar.

Tahun 2022 pengawasan dari luar datang dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai surat dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya nomor W3.Mil/32/KP.04.6/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 tentang Pemberitahuan rencana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2022 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada hari Senin tanggal 07 November 2022. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan LHKASN atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

LHKPN disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala, para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki



para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan

Tabel VI.2. LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2021

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2021	Kolonel Chk (K) Farma Nihayatul Aliyah, S.H. NRP. 11980035580769	14 Februari 2022
		Letkol Chk Rony Suryandoko, S.Ip., S.H., M.Han. NRP. 11000045041178	18 Januari 2022
		Letkol Chk Dedy Darmawan, S.H., M.H. NRP. 11990006941271	17 Januari 2022
		Letkol Chk I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. NRP. 636364	13 Januari 2022
		Letkol Chk (K) Kus Indrawati, S.H., M.H. NRP 11980036240871	19 Januari 2022
		Letkol Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. NRP. 11020002860972	10 Januari 2022
		Mayor Chk Ujang Taryana, S.H., M.H. NRP. 636558	7 Januari 2022
		Mayor Chk Musthofa, S.H., M.H. NRP. 607969	12 Januari 2022
		Mayor Chk Khairil Anwar S.Sos., S.H., M.H. NRP. 11030033700382	8 Maret 2022
		Mayor Chk Purwadi, S.H. NRP. 21960345950374	7 Februari 2022
		Kapten Chk Prima Ledy Yudoyono, ST. Han., S.H. NRP. 11130023470589	18 Januari 2022
		Peltu Rudianto, S.H. NRP. 21960347440875	10 Februari 2022
		Peltu M. Fauzan, S.Ag. NRP. 21960346110176	8 Februari 2022
		Peltu Faried Sunaryunan, S.H. NRP. 21970306830676	14 Februari 2022
		Ainur Rofiq, S.E. Penata Tk I/IIId NIP 197903172006041004	20 Januari 2022

Adapun LHKASN juga telah dilaporkan oleh seluruh jajaran PNS di Pengadilan Militer III-12 Surabaya mulai dari pejabat setingkat Eselon III, IV dan V. Berikut dilampirkan LHKASN seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :



Tabel VI.3 LHKASN Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2021	Rijani Widyanti, Penata Tk.1 / III/d NIP 197011281990032001	17 Maret 2022
		Firda Nuril Hanifah, S.Si Penata Tk.1 / III/d NIP 197804082006041004	11 Maret 2022
		Ainur Rofiq, S.E. Penata Tk I/III/d NIP 197903172006041004	12 Maret 2022
		Melanti Puspita, SE Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 198405302006042002	15 Maret 2022
		Setijo Utomo Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 1970030719940331002	17 Maret 2022
		Atim Sumarni Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 197004251998032001	15 Maret 2022
		Ratih Dina Agustin Penata Muda Tk.1 / III/b NIP 197608251998032002	15 Maret 2022
		Fransisca Angelina R., S.H. Penata Muda / IIIa NIP 199106082019032009	15 Maret 2022

C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.



1. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

a) Evaluasi Bidang Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) KPA harus mengecek kelengkapan berkas dokumen laporan keuangan dan melengkapi dan menyiapkan data dalam laporan keuangan selagi menunggu hasil rekon bulan Maret dari KPPN.
- 2) Akan dilakukan perencanaan penyerapan anggaran yang lebih baik.
- 3) Memeriksa dengan teliti setiap data yang akan diajukan gaji atau tunjangannya. Serta mencocokan dengan data OM SPAN dan menghubungi KPPN yang bersangkutan

b) Evaluasi Bidang Teknologi Informasi dan SIPP

Dari hasil pengawasan di bidang TI dan SIPP, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai yang memiliki dasar pendidikan TI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengajukan permohonan penambahan pegawai dimaksud
- 2) Agar segera melakukan perbaikan pada Aplikasi Sikominfosisid supaya bisa dipergunakan kembali.
- 3) Majelis Hakim dan Panitera Pengganti diharapkan bisa bekerjasama dalam mengupload putusan di Aplikasi SIPP.

c) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang kepegawaian, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :



- 1) Belum adanya penambahan fitur di aplikasi SIKEP yang dapat digunakan untuk input data pendidikan dan KGB bagi pegawai militer mengakibatkan keterlambatan KGB. Hakim pengawas merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dengan pengelola SIKEP di Mahkamah Agung. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti oleh bagian kepegawaian Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- 2) Adanya kekurangan tenaga Panitera Pengganti akan ditindaklanjuti dengan mengirimkan permohonan penambahan tenaga Panitera Pengganti.

d) Evaluasi Bidang Administrasi Umum

Dari hasil pengawasan di bidang administrasi umum, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya arsip yang masih belum tertata rapi disebabkan karena ruang arsip telah penuh dan tidak mencukupi. Sebagai rekomendasi, Hakim Pengawas memberikan masukan agar arsip-arsip yang telah lama dipisahkan dan ditempatkan di ruang tersendiri. Rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan menata kembali arsip-arsip yang ada.
- 2) Pemegang BMN yang belum memiliki surat perintah / penunjukan sebagai pemegang BMN telah dibuatkan dokumen dukung tentang pertanggungjawaban BMN.

e) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Masih adanya BAS yang belum selesai tepat waktu mengakibatkan hambatan pada minutasi yang berakibat pada kecilnya nilai capaian SIPP. Untuk mengatasi hal ini,



Hakim Pengawas merekomendasikan agar Majelis Hakim memonitor dan mendorong terlaksananya penyelesaian BAS secara tepat waktu.

f) Evaluasi Bidang Pelayanan Publik

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

- 1) Adanya kekosongan petugas di meja PTSP pada saat jam kerja disebabkan kurangnya jumlah pegawai. Untuk mengatasi hal ini, akan disusun kembali jadwal piket petugas PTSP.
- 2) Pengisian survei yang belum maksimal disebabkan karena rusaknya e-kios sebagai perangkat untuk menampilkan aplikasi pengisian survei. Sebagai solusi, aplikasi survei dijadikan satu dalam perangkat yang sama dengan buku tamu elektronik. Hal ini menyebabkan pengunjung tidak mengetahui keberadaan aplikasi survei tersebut, sehingga pengunjung tidak dapat mengisi survei.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan tidak adanya kasus gratifikasi selama tahun 2022 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2022 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan



BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2022 secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Beban perkara sejumlah 208 perkara. Perkara putus sejumlah 177 perkara. Sisa perkara tahun 2022 sejumlah 15 perkara.
2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sejumlah 92 perkara atau 75% dari total perkara yang diputus.
3. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 98.29% dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 98,14%.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 5.1.0, dengan rasio penanganan perkara 85.10%.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 33 perkara.
7. Dari hasil wasmat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.
8. Nilai survei indeks kepuasan masyarakat di akhir tahun 2022 (Triwulan 4) sebesar 98.90 dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun Nilai survei indeks persepsi korupsi di akhir tahun 2022 (Triwulan 4) sebesar 99.06 dengan kategori SANGAT BAIK.



B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap berkenan memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan
3. Kepada Hakim Pengawas Bidang agar mengoptimalkan fungsi pengawasan dan selanjutnya dapat memberi rekomendasi tindak lanjut.